

RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dimulai dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja yang susunannya terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait, perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari lembaga masyarakat, serta pembentukan Tim Penyusun Dokumen yang susunan keanggotaannya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen ini dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Tahapan yang dilalui dalam Penyusunan DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun DIKPLHD yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/115/DLH/2019;
2. Pelaksanaan FGD Pertama dan Sosialisasi Penyusunan DIKPLHD yang diikuti oleh Tim Kelompok Kerja Penyusun DIKPLHD provinsi dan Perwakilan dari kabupaten/kota;
3. Identifikasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan DIKPLHD sesuai pedoman penyusunan yang terbaru;
4. Pelaksanaan FGD ke-2 untuk melakukan analisis cepat terhadap data-data yang telah ada dengan metode DPSIR secara singkat, dilanjutkan dengan identifikasi dan penyaringan isu;
5. Pengelompokan isu dan pengolahan isu dengan metode AHP dalam tim internal di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. FGD ke-3 untuk membahas analisis dengan metode DPSIR;
7. Pendokumentasian dan penulisan dokumen DIKPLHD;

8. Pengiriman dokumen IKPLHD;
9. Penginputan data ke dalam sistem informasi lingkungan hidup di aplikasi data alam;
10. FGD ke-4 untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen IKPLHD kepada Tim Kelompok Kerja, dan mempublikasikan dokumen IKPLHD Tahun 2019 yang telah tersusun.

Perumusan isu prioritas dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen. Perumusan Isu Prioritas dimulai dengan menyajikan data-data terkait yang telah dikumpulkan kepada Tim Kelompok Kerja serta melakukan analisis cepat terhadap data-data tersebut dengan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response*. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis cepat tersebut peserta FGD mengidentifikasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dilakukan diskusi dan pengelompokan isu-isu tersebut. Hasil pengelompokan isu diolah dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan matriks *pairwise comparison* untuk mendapatkan isu prioritas yang akan dijadikan isu utama dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil analisis data yang tersedia, dan hasil diskusi bersama Tim Kelompok Kerja Penyusun IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, maka ditentukan 4 isu prioritas lingkungan hidup daerah, yaitu :

1. Degradasi kualitas pesisir dan laut,
2. Kualitas air yang masih rendah,
3. Banjir, dan
4. Pengelolaan sampah dan limbah domestik.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan wilayah kepulauan yang terdiri dari dua gugusan pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, beserta pulau-pulau kecil yang mengitarinya. Kepulauan Bangka Belitung yang beriklim tropis memiliki luas wilayah 81.725,23 km² dengan 79,9%-nya merupakan wilayah lautan. Potensi pengembangan perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung sangat besar, terutama sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, serta kelautan dan perikanan.

Kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanding dengan kemajuan perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan. Selain menyejahterakan masyarakat, aktivitas perekonomian dan pembangunan juga menimbulkan permasalahan yang bisa mengganggu atau mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam rangka mencari solusi untuk permasalahan tersebut, diterapkan sebuah metode atau kerangka berpikir dengan *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)*.

Driving force menggambarkan perkembangan sosial, demografi, dan ekonomi dalam masyarakat. *Driving force* mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti pangan, tempat tinggal, air, kesehatan, keamanan, bahan baku, infrastruktur, hubungan sosial, kesejahteraan sosial, pemerintahan, dan identitas budaya.. Beberapa jenis *driving force* yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya adalah:

1. Sektor yang memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan;
2. Sektor yang memenuhi kebutuhan tempat tinggal, seperti perumahan (konstruksi, real estate, dll.);
3. Sektor yang memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti *health care*, rumah sakit, dan pengolahan limbah;

4. Sektor yang memenuhi kebutuhan budaya, seperti pariwisata dan organisasi sosial;
5. Sektor yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan utilitas;
6. Dorongan kebutuhan organisasi kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, seperti akses untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan karakter sosial budaya.

Pressure didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang timbul akibat *driving force* yang mendorong perubahan lingkungan atau perilaku manusia yang bisa mempengaruhi lingkungan. Beberapa aktivitas perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi *pressure* bagi lingkungan, di antaranya adalah aktivitas pengerukan, penambangan, pergerakan kapal, penangkapan ikan, deforestasi, industri pengolahan timah dan aktivitas industri lainnya. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan di laut menghasilkan lumpur atau sedimen yang akan terbawa arus laut hingga mengendap menutupi permukaan terumbu karang ataupun padang lamun. Eksploitasi tambang timah di laut yang tidak seimbang dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan memberikan tekanan terhadap kondisi lingkungan, terutama wilayah laut di Kepulauan Bangka Belitung.

State menggambarkan kondisi lingkungan, baik lingkungan yang alami maupun lingkungan buatan. Menurut proses pembentukannya, kondisi lahan di Kepulauan Bangka Belitung didominasi dengan bentukan lahan denudasional yang terbentuk akibat proses erosi dan sedimentasi. Akibat bentukan lahan jenis ini, potensi persediaan air tanah di Kepulauan Bangka Belitung sangat terbatas. Kemampuan lahan untuk menyerap dan menyimpan air sangat kurang sehingga kondisi daya dukung jasa penyediaan air cenderung berada pada kelas rendah atau sangat rendah.

Kondisi lahan dan air di Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian yang dilaksanakan oleh penduduk, seperti pertambangan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan. Dari tahun 2015 s.d. 2018, tutupan hutan lahan kering dan mangrove mengalami penurunan, sementara tutupan lahan pertambangan, permukiman, dan perkebunan semakin bertambah. Alih fungsi lahan ini menyebabkan timbulnya erosi dan sedimentasi yang pada akhirnya mengurangi kandungan unsur hara tanah. Selain itu, kerusakan lahan dan hutan yang terjadi menyebabkan rawannya bencana banjir.

Secara umum, kondisi lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung dapat diringkas sebagai berikut.

- a. Luasan lahan kritis yang besar akibat dari berkurangnya unsur hara tanah secara terus-menerus yang menyebabkan timbulnya lahan-lahan tidak produktif.
- b. Ekosistem pesisir dan laut yang terganggu atau rusak. Rusaknya ekosistem pesisir dan laut ini ditandai dengan rusak atau matinya habitat mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang merupakan habitat kunci di wilayah pesisir dan laut.
- c. Kondisi air tanah di Kepulauan Bangka Belitung yang tercemar dan jumlahnya terbatas menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Impact atau dampak dari perubahan lingkungan akibat aktivitas perekonomian, terutama dari sektor industri dan pertambangan yang menghasilkan banyak limbah, di antaranya menyebabkan kerusakan lahan, penurunan kualitas air maupun kerusakan pesisir dan laut. Selain itu, maraknya pembangunan perumahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tempat tinggal penduduk yang semakin bertambah banyak jumlahnya, telah menyebabkan peningkatan jumlah limbah sampah yang belum mampu ditangani seluruhnya secara tuntas. Permasalahan sampah ini perlu ditangani secara serius agar fungsi lingkungan tetap terjaga.

Response adalah tindakan yang diambil oleh suatu kelompok atau individu dalam masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengganti rugi, memperbaiki atau beradaptasi dengan perubahan keadaan lingkungan, serta untuk memodifikasi perilaku manusia yang berkontribusi terhadap munculnya dampak atau resiko. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan beberapa kebijakan dan melaksanakan beberapa program terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan TPA regional, mitigasi bencana, dan percepatan penyelesaian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan beberapa contoh prioritas pemerintah daerah saat ini.

Pemerintah bersama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa kebijakan atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk *response* atau tanggapan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, di antaranya adalah :

- a. Rehabilitasi lahan, melalui reklamasi lahan bekas tambang, penanaman pohon dan penghijauan atau reboisasi.
- b. Penggunaan Kompos Babel yang diberikan pada lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman atau revegetasi.
- c. Bimbingan teknis dan sosialisasi untuk mahasiswa dan masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama melalui bank sampah.
- d. Instruksi dan edaran terkait pengurangan timbulan sampah organik dan anorganik, termasuk sampah plastik
- e. Bimbingan teknis nelayan di wilayah pesisir untuk melakukan transplantasi terumbu karang yang telah rusak atau mati sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki ekosistem pesisir dan laut. Kegiatan ini merupakan respon terhadap kerusakan habitat terumbu karang yang merupakan akibat dari sedimentasi yang merupakan hasil aktivitas pertambangan di laut.

- f. Penangkaran satwa langka sebagai sarana habituasi dan edukasi, serta kampanye kepada masyarakat terkait perlindungan satwa langka di Bangka Belitung oleh komunitas pecinta hewan ALOBI.
- g. Pemantauan kualitas air sungai dan udara secara rutin setiap tahun untuk memastikan kondisi air sungai dan udara tetap terjaga.
- h. Dalam rangka menjaga persediaan air tanah di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah melalui tim teknis Komisi Penilai AMDAL memberikan masukan terkait kajian ketersediaan air tanah, dan penghematan dalam pemanfaatannya untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pelaksanaan kegiatannya.
- i. Dalam rangka menjaga kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara secara rutin.

Berdasarkan uraian dan data-data yang tersaji dalam dokumen IKPLHD ini, beberapa hal berikut ini menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Menanggulangi kerusakan lahan yang sudah cukup parah di Kepulauan Bangka Belitung, serta menciptakan tindakan antisipatif untuk pencegahan kerusakan lahan yang lebih parah. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan mengaplikasikan inovasi-inovasi yang aplikatif untuk merehabilitasi lahan, baik lahan hutan yang mengalami kerusakan maupun lahan bekas pertambangan.
2. Terkait pencemaran air tanah dan air permukaan di Kepulauan Bangka Belitung, perlu tindakan pengawasan secara rutin dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang membuang limbah cair industri ke sungai atau badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku. Perlu juga digalakkan penggunaan pupuk kompos di bidang pertanian dan perkebunan sebagai pengganti pupuk kimia.

3. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan intensitas yang lebih sering kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. Penerapan teknologi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, serta mempercepat terwujudnya TPA Regional.
5. Segera menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan, terutama pertambangan di wilayah laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem.
6. Mempercepat penyelesaian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang harus sudah mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di dalamnya agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan ruang di wilayah pesisir dan laut.
7. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan dibentuk kawasan-kawasan strategis yang memiliki peran penting terhadap kemajuan perekonomian. Pembangunan kawasan-kawasan strategis tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengacu pada RPPLH provinsi yang telah disusun, serta memperhatikan dan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ada.